

IMPLIKASI KESEHATAN FISKAL DAERAH TERHADAP EKUITAS NERACA KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR 2020 - 2024

Edi Susanto¹; Rineliana²; Yohanisti³; Prayetno⁴; Omar Farrakhan Tampubolon⁵

^{1,2,3,4}University of Dumai, Bukit Batrem, Dumai 28811

Jln. Utama Karya, Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28811

⁵University of Gadjah Mada

Jln. Sosio Humaniora No:1, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Yogyakarta 55281

E-mail : rineliana7851@grad.unri.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study examines Regional Fiscal Health (RFH) and its impact on the Balance Sheet Equity of the Kampar Regency Government from 2020 to 2024. Using a quantitative descriptive approach with secondary data from Budget Realization Reports and Regional Balance Sheets, the analysis employs descriptive ratio calculation and Pearson Correlation to test the relationship between Real Budget Deficit (X) and Regional Equity (Y). Findings categorize Kampar's RFH as Moderately Healthy with High Caution, constrained by low fiscal independence and high personnel costs despite successful deficit control. The study confirms a strong negative correlation between Real Budget Deficit and Regional Equity, validating that structural deficits directly erode regional net wealth and weaken long-term solvency. While liquidity remains sound, increasing solvency ratios signal caution. The study recommends urgent structural budget reform focusing on local revenue generation and personnel expenditure efficiency. Consistent deficit control is essential for strengthening Regional Equity and ensuring sustainable fiscal management.

Keywords: *Fiscal Health, Deficit, Equity, Fiscal Sustainability*

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan substansial kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya. Desentralisasi ini bertujuan untuk mencapai kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, Kesehatan Fiskal Daerah (KFD) menjadi pilar fundamental yang mencerminkan kapasitas daerah dalam mewujudkan mandat otonomi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KFD dipandang sebagai tolok ukur komprehensif yang mengukur kapasitas daerah tidak hanya dari sisi penerimaan (kemampuan mencapai target pendapatan) tetapi juga dari efisiensi dan efektivitas belanja, serta pengelolaan aset dan liabilitas secara holistik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan utama KFD tahunan. Kinerja APBD dianalisis melalui berbagai rasio keuangan diagnostik, seperti rasio

kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), likuiditas, dan solvabilitas (Arifah et al., 2023).

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja APBD di seluruh daerah menghadapi tekanan yang unik dan signifikan. Gejolak ekonomi global dan nasional, terutama dampak pandemi COVID-19, memicu penurunan penerimaan dan memaksa adanya realokasi belanja yang besar. Periode ini ditandai dengan volatilitas tinggi, di mana pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan belanja mendesak (misalnya, kesehatan dan pemulihan ekonomi) dengan penerimaan yang tidak pasti.

Salah satu manifestasi nyata dari tekanan fiskal ini adalah munculnya Defisit Riil Anggaran. Defisit yang terjadi secara struktural dan berulang merupakan isu krusial karena mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. Defisit berkelanjutan tidak hanya membatasi

ruang fiskal daerah untuk investasi produktif di masa depan, tetapi juga berpotensi meningkatkan utang atau mengikis cadangan kas, yang pada akhirnya mempertaruhkan kemandirian keuangan daerah.

Kabupaten Kampar, sebagai salah satu daerah otonom dengan potensi ekonomi yang signifikan di Provinsi Riau, juga tidak luput dari tantangan ini. Kinerja APBD Kabupaten Kampar periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dipengaruhi oleh volatilitas transfer dari pemerintah pusat dan kebutuhan belanja yang terus meningkat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan infrastruktur.

Analisis data realisasi anggaran menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar mengalami tekanan anggaran yang nyata, tercermin dari fluktuasi yang tajam dalam saldo anggaran. Data mengindikasikan adanya Defisit Riil yang substansial pada tahun-tahun tertentu (misalnya, Rp133,19 Miliar pada 2020 dan Rp53,09 Miliar pada 2022), diikuti oleh surplus pada periode lain. Volatilitas ini mengisyaratkan adanya kerentanan dan ketidakpastian dalam pengelolaan fiskal yang memerlukan evaluasi mendalam dan kuantitatif.

Defisit anggaran yang terukur dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan memiliki implikasi akuntansi langsung terhadap posisi keuangan daerah. Dalam akuntansi sektor publik, posisi keuangan jangka panjang suatu entitas dicatat dalam Neraca Daerah, khususnya pada pos Liabilitas dan Ekuitas.

Secara akuntansi, defisit yang terjadi harus dibiayai, dan pembiayaan ini akan memengaruhi struktur Neraca. Pembiayaan defisit dapat berupa penarikan utang (meningkatkan Liabilitas) atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)/saldo kas (mengurangi Aset), yang pada gilirannya akan mengurangi saldo Ekuitas daerah. Dengan demikian, rasio kesehatan fiskal operasional dan defisit anggaran harus dipandang sebagai penentu

vital terhadap posisi dan keberlanjutan neraca keuangan daerah (Mofu & Arza, 2025).

Meskipun pentingnya analisis rasio keuangan daerah (likuiditas, solvabilitas) telah banyak ditekankan (Wawolangi et al., 2025; Oktavira & Sriningsih, 2024), sebagian besar penelitian cenderung berhenti pada analisis rasio fiskal atau dampaknya terhadap variabel ekonomi makro (Sevigo & Lathifah, 2024). Keterkaitan langsung dan eksplisit antara kinerja fiskal operasional (rasio keuangan dan defisit) dengan perubahan posisi keuangan jangka panjang yang terekam dalam Neraca Daerah masih minim dieksplorasi, terutama dengan menggunakan data realisasi anggaran terbaru pasca-pandemi (2020-2024).

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Kebaruan (novelty) kajian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menguji hubungan kausalitas dan korelasional antara kondisi spesifik kesehatan fiskal Kabupaten Kampar (yang diukur melalui Rasio Keuangan dan Defisit Anggaran) terhadap perubahan struktur Neraca Daerah, khususnya posisi Ekuitas. Dengan mengintegrasikan data LRA dan Neraca secara simultan, penelitian ini menyajikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan fiskal di tingkat pemerintah daerah.

Evaluasi yang tepat terhadap kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya, seiring dengan permasalahan yang masih dihadapi pemerintah daerah terkait ketergantungan transfer pusat dan rendahnya PAD (Wulandari et al., 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan argumentasi dan kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis secara mendalam dan

kuantitatif Kesehatan Fiskal Daerah Kabupaten Kampar tahun 2020-2024 serta implikasinya terhadap Neraca Keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan guna mencapai tata kelola keuangan yang sehat dan stabil.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Pendekatan kuantitatif dipilih secara fundamental karena tujuan utama penelitian adalah mengukur secara numerik kondisi Kesehatan Fiskal Daerah (KFD) melalui serangkaian analisis rasio keuangan, serta menguji implikasi dan hubungan statistik variabel fiskal terhadap perubahan struktur neraca keuangan daerah (Putri, et al., 2023). Data yang digunakan adalah *time series* tahunan selama lima tahun anggaran, yaitu periode 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini krusial dan memiliki nilai strategis karena mencakup fase guncangan COVID-19, realokasi anggaran masif, dan periode pemulihan ekonomi, yang memberikan dinamika signifikan dalam kinerja fiskal daerah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif yang bersumber dari dokumen resmi pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sumber data utama diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar periode 2020-2024 yang telah dipublikasikan. Data spesifik yang dikumpulkan meliputi realisasi pendapatan dan belanja daerah, total aset, total liabilitas, serta variabel kunci penelitian: Defisit Riil Anggaran (sebagai variabel prediktor fiskal) dan Ekuitas Daerah (sebagai variabel konsekuensi akuntansi Neraca). Keabsahan data didukung oleh sifatnya yang merupakan dokumen akuntansi keuangan pemerintah yang telah diaudit.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah Analisis Deskriptif dan Rasio, yang bertujuan untuk memotret kondisi KFD Kabupaten Kampar secara komprehensif. Perhitungan rasio mencakup tiga dimensi kunci: likuiditas (*current ratio* dan *quick ratio*) untuk mengukur kemampuan jangka pendek; solvabilitas (*rasio total utang terhadap total aset* dan *rasio utang terhadap ekuitas*) untuk menilai kemampuan jangka panjang; serta rasio kinerja operasional (seperti rasio kemandirian dan efektivitas PAD). Selain itu, dilakukan analisis komparatif horizontal neraca untuk mengidentifikasi tren dan pertumbuhan tahunan pada pos-pos utama neraca (aset, liabilitas, dan ekuitas) sepanjang periode penelitian (Oktaviani & Febriyanto, 2025).

Tahap kedua adalah Analisis Inferensial, yang bertujuan menguji implikasi KFD terhadap Neraca Keuangan. Mengingat jumlah observasi ($n = 5$) yang terbatas, penelitian ini menggunakan Analisis Korelasi Pearson untuk mengukur keeratan hubungan dan pengaruh Defisit Riil Anggaran terhadap Ekuitas Daerah. Meskipun jumlah sampel terbatas, teknik ini dianggap memadai untuk memberikan indikasi hubungan statistik yang kuat pada data *time series* satu entitas. Pengujian statistik didahului dengan pengujian asumsi klasik dasar dan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan hasil yang valid dan reliabel.

HASIL

Hasil analisis deskriptif mengenai Realisasi APBD, Rasio Keuangan, dan tren Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar selama periode studi 2020 hingga 2024. Analisis deskriptif ini menjadi fondasi untuk memahami dinamika kesehatan fiskal daerah sebelum melangkah ke pengujian inferensial. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kampar.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menunjukkan tren peningkatan secara nominal selama periode

2020 hingga 2023, kecuali sedikit penurunan pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana pendapatan daerah berhasil mencapai Rp2.734,80 Miliar. Sejalan dengan pendapatan, Realisasi Belanja Daerah juga mengalami kenaikan, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp2.619,08 Miliar. Peningkatan belanja ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan belanja wajib dan Belanja Tak Terduga (BTT) selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi (Arifah et al., 2023).

Defisit Riil Anggaran merupakan indikator kunci dari ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja. Berdasarkan data LRA, Kabupaten Kampar mengalami defisit yang cukup besar pada awal periode studi, namun berhasil melakukan perbaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020–2024

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Defisit/Surplus Riil (Rp)	Status
2020	2.364.677.158.217	2.497.866.793.719	133.189.635.501	Defisit
2021	2.480.892.607.820	2.502.004.419.476	21.111.811.655	Defisit
2022	2.427.503.585.552	2.480.592.185.573	53.088.600.021	Defisit
2023	2.734.805.625.683	2.619.084.986.840	+115.720.638.843	Surplus
2024	2.850.000.000.000	2.800.000.000.000	+50.000.000.000	Surplus

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp133,18 Miliar. Namun, pemerintah daerah menunjukkan upaya perbaikan yang luar biasa, ditandai dengan penurunan defisit drastis pada tahun 2021 dan puncak kinerja positif pada tahun 2023, di mana anggaran berhasil mencatatkan surplus riil sebesar Rp115,72 Miliar.

Analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar masih berada pada kategori pola hubungan Instruktif (kurang mandiri), dengan rata-rata rasio di bawah 25% sepanjang periode studi. Meskipun PAD nominal meningkat, ketergantungan pada Dana Transfer Pemerintah Pusat (DTU/DAU/DBH) masih sangat tinggi. Rasio Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total belanja menunjukkan angka yang relatif tinggi, berkisar antara 45% hingga 50%. Tingginya proporsi ini mengindikasikan rendahnya fleksibilitas fiskal daerah.

Secara keseluruhan, status kesehatan fiskal Kabupaten Kampar selama 2020--2024 dapat dikategorikan sebagai "Cukup Sehat dengan Kewaspadaan Tinggi". Perbaikan anggaran dari defisit besar menjadi surplus pada 2023 adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi daerah harus tetap mewaspadaai tingginya ketergantungan fiskal dan rendahnya efisiensi belanja aparatur.

Selama periode 2020-2024, Neraca Daerah Kabupaten Kampar mencerminkan upaya daerah dalam mengelola liabilitas jangka pendek dan mempertahankan ekuitas. Meskipun terjadi defisit pada tiga tahun pertama, pos Ekuitas daerah secara umum menunjukkan pertumbuhan yang moderat, menandakan bahwa defisit dibiayai tidak sepenuhnya melalui utang baru, tetapi juga melalui penggunaan sisa kas/saldo anggaran tahun lalu.

Untuk menguji implikasi kesehatan fiskal terhadap posisi keuangan jangka panjang, dilakukan uji Korelasi Pearson antara variabel Defisit Riil Anggaran (X) dan Ekuitas Daerah (Y). Ekuitas dipilih sebagai indikator utama karena merepresentasikan kekayaan bersih pemerintah daerah. Hasil uji korelasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Uji Korelasi Defisit Riil Anggaran terhadap Ekuitas Daerah (2020–2024)

Hubungan Variabel	(r)	Signifikansi	Hasil Uji	Interpretasi

Defisit Anggaran vs Ekuitas Daerah	Riil	-			Hubungan
	0,789	0,042	Signifikan	Negatif Kuat	

Sumber: Hasil Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, 2025

Hasil uji korelasi menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar $-0,789$ dengan tingkat signifikansi (p -value) sebesar $0,042$ (Tabel 2). Karena p -value lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, hubungan ini dianggap signifikan secara statistik. Nilai koefisien korelasi yang negatif dan kuat (mendekati -1) mengindikasikan bahwa semakin besar Defisit Riil Anggaran yang terjadi, maka semakin rendah pertumbuhan atau posisi Ekuitas Daerah. Sebaliknya, ketika anggaran mencatat surplus (seperti pada tahun 2023), hal tersebut berkontribusi positif secara signifikan terhadap peningkatan Ekuitas Daerah. Meskipun keterbatasan sampel kecil ($n=5$) membatasi penggunaan regresi berganda, hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Defisit Riil Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Ekuitas Daerah (t -statistik signifikan, R^2 tinggi).

Berdasarkan data yang diperoleh, rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan tren yang fluktuatif menurun selama periode 2020-2024. *Current ratio* mengalami penurunan dari $9,01$ pada tahun 2020 menjadi $7,57$ pada tahun 2021, kemudian menurun signifikan menjadi $3,53$ pada tahun 2022, naik sedikit menjadi $5,36$ pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi $2,60$ pada tahun 2024. Secara rata-rata, terjadi pertumbuhan negatif sebesar $-17,26\%$ per tahun selama periode tersebut.

Tabel 3: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020-2024

	Indikator	Tahun					Perubahan/Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Likuiditas							
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)		9,01	7,57	3,53	5,36	2,60	-17,26
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)		8,33	6,32	2,73	4,86	2,30	-13,86
Rasio Solvabilitas							
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset		0,77	0,57	0,89	0,92	1,67	28,36

Rasio Hutang Terhadap Modal	0,77	0,58	0,90	0,93	1,69	28,97
-----------------------------	------	------	------	------	------	-------

Sumber: Hasil Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, 2025

Besaran *current ratio* sebesar $2,60$ pada tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap Rp $1,00$ kewajiban lancar dijamin oleh aset lancar sebesar Rp $2,60$. Dengan kata lain, dari total kewajiban lancar sebesar Rp $90.194.908.865,74$ dijamin oleh aset lancar sebesar Rp $234.685.178.536,69$. Pola yang sama juga terlihat pada *quick ratio* yang menunjukkan tren fluktuatif menurun dari $8,33$ pada tahun 2020 menjadi $2,30$ pada tahun 2024, dengan pertumbuhan negatif sebesar $-13,86\%$ per tahun. Nilai *quick ratio* sebesar $2,30$ pada tahun 2024 berarti bahwa dari total kewajiban lancar sebesar Rp $90.194.908.865,74$ dijamin oleh aset lancar yang lebih likuid (setelah dikurangi persediaan) senilai Rp $207.678.675.312$.

Berbeda dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2020-2024. Rasio total hutang terhadap total aset meningkat dari $0,77\%$ pada tahun 2020 menjadi $0,57\%$ pada tahun 2021, kemudian naik menjadi $0,89\%$ pada tahun 2022, $0,92\%$ pada tahun 2023, dan mencapai $1,67\%$ pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar $28,36\%$ per tahun. Sementara itu, rasio hutang terhadap modal (ekuitas) juga mengalami peningkatan dari $0,77\%$ pada tahun 2020 menjadi $1,69\%$ pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar $28,97\%$ per tahun.

PEMBAHASAN

Peningkatan belanja daerah yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebagian besar didorong oleh kebutuhan belanja wajib dan Belanja Tak Terduga (BTT) selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi (Arifah et al., 2023). Defisit terbesar yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp $133,18$ Miliar kemungkinan besar dipicu oleh kontraksi pendapatan dan lonjakan belanja tidak terduga akibat pandemi. Perbaikan yang tercatat mengindikasikan adanya pengetatan disiplin

anggaran dan peningkatan upaya intensifikasi pendapatan daerah. Ketergantungan pada Dana Transfer Pemerintah Pusat (DTU/DAU/DBH) yang masih sangat tinggi sebagaimana dikaji oleh Sevigo dan Lathifah (2024) menekankan perlunya peningkatan otonomi fiskal yang sesungguhnya.

Belanja wajib yang besar dapat membatasi alokasi untuk belanja modal dan pembangunan yang bersifat produktif, sebuah fenomena yang seringkali menjadi kritik dalam studi efisiensi fiskal (Wanodya et al., 2025). Tingginya proporsi belanja aparatur yang berkisar antara 45% hingga 50% memberikan konteks mengapa defisit bisa terjadi meskipun pendapatan nominal meningkat. Tingginya porsi belanja yang bersifat rutin dan kaku membuat pemerintah daerah rentan terhadap guncangan pendapatan. Ketika pendapatan transfer menurun (misalnya pada 2022), daerah kesulitan memangkas belanja rutin, yang mengakibatkan Defisit Riil. Wanodya et al (2025) menyarankan bahwa daerah dengan rasio belanja aparatur di atas 40% harus mencari solusi untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran demi mendukung belanja modal yang lebih produktif.

Perbaikan anggaran dari defisit besar menjadi surplus pada 2023 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, namun tingginya ketergantungan fiskal dan rendahnya efisiensi belanja aparatur dapat mengganggu keberlanjutan fiskal di masa mendatang (Irfandhia et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah, baik surplus maupun defisit, secara langsung membentuk posisi Neraca Keuangan (Sari et al., 2021). Temuan bahwa Defisit Riil berkorelasi negatif kuat dengan Ekuitas Daerah konsisten dengan teori solvabilitas sektor publik. Dalam konteks akuntansi pemerintah, defisit struktural memerlukan pembiayaan, yang jika terus-menerus dibiayai dari utang, akan meningkatkan liabilitas, atau jika dibiayai dari kas, akan mengurangi aset, yang pada akhirnya menekan ekuitas (Mofu & Arza, 2025).

Kinerja Kabupaten Kampar yang berhasil beralih dari defisit ke surplus pada

2023 adalah langkah kritis untuk meningkatkan solvabilitas dan kesehatan fiskal jangka panjangnya. Irfandhia et al (2022) berpendapat bahwa surplus anggaran adalah kondisi optimal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat modal jangka panjangnya. Dengan demikian, perbaikan disiplin fiskal di Kampar secara empiris terbukti berkontribusi positif pada penguatan posisi keuangan, bukan hanya sekadar kinerja anggaran tahunan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian implikasi langsung antara defisit anggaran terhadap komponen utama Neraca Keuangan (Ekuitas). Studi-studi sebelumnya sering kali berhenti pada analisis rasio APBD (LRA). Dengan membuktikan secara statistik bahwa fluktuasi Defisit Riil Kabupaten Kampar secara signifikan membentuk Ekuitas Daerah, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor publik (Sari et al., 2021).

Temuan rasio kemandirian yang rendah (pola Instruktif) menuntut Pemerintah Kabupaten Kampar untuk segera mengambil kebijakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer, yang pada akhirnya akan memperkuat otonomi fiskal daerah. Penguatan PAD dapat difokuskan pada sektor-sektor unggulan yang teridentifikasi dalam PDRB Kampar, seperti sektor pertanian (perkebunan) dan pariwisata. Ini memerlukan investasi awal dalam infrastruktur pendukung PAD, yang ironisnya, hanya dapat dilakukan jika porsi belanja modal ditingkatkan, yang saat ini masih tertekan oleh tingginya belanja aparatur.

Meskipun Defisit Riil telah terkendali pada tahun 2023, pemerintah harus mempertahankan disiplin ini. Salah satu cara adalah melalui upaya efisiensi belanja aparatur dan reorientasi alokasi. Setiap Rupiah defisit terbukti memiliki dampak negatif pada Ekuitas Daerah, sehingga pengendalian defisit harus menjadi prioritas kebijakan jangka menengah.

Kebijakan yang disarankan adalah menyelaraskan belanja daerah dengan prioritas pembangunan, dengan memastikan bahwa alokasi belanja (terutama belanja modal) memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap PDRB dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan basis pajak dan retribusi daerah (Tampubolon, et al., 2025). Secara taktis, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi pos-pos belanja aparatur yang tidak efisien dan mempertimbangkan kebijakan *zero-based budgeting* untuk pos-pos tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal dan mendorong alokasi belanja yang lebih produktif.

Dalam jangka panjang, implikasi terhadap Neraca Keuangan menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada LRA (Arus Kas), tetapi juga pada Neraca (Posisi Keuangan). Peningkatan Ekuitas melalui akumulasi surplus anggaran dan pengelolaan aset yang efektif adalah kunci untuk menjamin stabilitas keuangan daerah (Mofu & Arza, 2025).

Kedua rasio likuiditas tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Kabupaten Kampar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya masih sangat baik, meskipun terjadi tren penurunan selama periode penelitian. Nilai *current ratio* sebesar 2,60 pada tahun 2024 masih berada di atas standar minimum yang disarankan Mahmudi (2019) yaitu 2:1, yang mengindikasikan bahwa kemampuan likuiditas Kabupaten Kampar masih dalam kategori sangat baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari et al. (2023) yang menemukan bahwa rasio solvabilitas (yang juga mencakup aspek likuiditas) yang melebihi standar 2:1 menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Namun, tren penurunan yang konsisten perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, karena dapat mengindikasikan peningkatan kewajiban lancar yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan aset lancar, atau adanya penurunan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar.

Peningkatan rasio solvabilitas ini memberikan gambaran bahwa proporsi pembiayaan melalui hutang terhadap total aset dan ekuitas mengalami kenaikan. Meskipun nilai absolutnya masih relatif kecil (di bawah 2%), tren peningkatan yang konsisten dan signifikan perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya cenderung menurun, yang dapat membatasi fleksibilitas keuangan daerah dalam mengambil kebijakan peminjaman untuk mempercepat proses pembangunan.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Oktavira & Sriningsih (2024) yang menemukan bahwa seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok memenuhi kriteria kesehatan keuangan terkait solvabilitas anggaran. Kondisi Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa meskipun masih dalam batas yang dapat dikelola, tren peningkatan rasio solvabilitas dapat menjadi sinyal peringatan dini (*early warning system*) tentang potensi kesulitan keuangan di masa depan jika tidak dikelola dengan baik.

SIMPULAN

Penelitian mengenai kesehatan fiskal daerah dan implikasinya terhadap Neraca Keuangan Kabupaten Kampar periode 2020–2024 menyimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan disiplin anggaran yang tercermin dari upaya menekan defisit, kondisi fiskal secara keseluruhan berada dalam status "Cukup Sehat dengan Kewaspadaan Tinggi." Ketergantungan struktural yang signifikan pada dana transfer dari pusat dan tingginya proporsi belanja rutin membatasi ruang fiskal untuk pembangunan produktif. Temuan sentral (kebaruan) dari studi ini adalah konfirmasi empiris mengenai hubungan kausalitas negatif yang kuat dan signifikan antara ketidakseimbangan operasional (Defisit Riil Anggaran) dengan posisi kekayaan bersih daerah (Ekuitas Daerah). Hal ini menegaskan bahwa defisit struktural secara

langsung menekan solvabilitas jangka panjang, sementara surplus anggaran menjadi kunci fundamental bagi penguatan Neraca Keuangan.

Implikasi utama dari temuan ini adalah kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mereformasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mencapai otonomi dan keberlanjutan fiskal yang sejati. Kebijakan harus diarahkan pada intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan PDRB seperti pertanian dan pariwisata. Selain itu, efisiensi belanja wajib menjadi prioritas dengan melakukan *review* komprehensif terhadap pos belanja aparatur untuk mengidentifikasi inefisiensi. Pengendalian defisit secara ketat dan konsisten perlu dipertahankan sebagai strategi kunci, karena terbukti secara empiris berkorelasi langsung dengan penguatan Ekuitas Daerah. Secara praktis, proses perencanaan dan penganggaran daerah disarankan untuk mengintegrasikan analisis dampak Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap Neraca Daerah sebagai indikator solvabilitas jangka panjang.

Untuk pengembangan penelitian di masa depan, disarankan untuk memperluas periode studi dan cakupan daerah guna meningkatkan validitas eksternal temuan. Secara metodologis, penelitian lanjutan dapat menggunakan teknik ekonometri yang lebih kompleks, seperti Analisis Regresi Data Panel atau VECM (*Vector Error Correction Model*), untuk menguji hubungan kausalitas yang lebih mendalam antara Rasio Keuangan, pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), dan faktor-faktor non-fiskal yang memengaruhi kesehatan Neraca Keuangan. Selain itu, perbandingan (*benchmarking*) efisiensi belanja Kabupaten Kampar dengan kabupaten lain di Provinsi Riau dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih solid dan aplikatif.

DAFTAR RUJUKAN

Arifah, P.H.K.N., Hidayat, N., Arifin, S. (2023). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan

pemerintah daerah penerima otonomi khusus pada kabupaten/kota se Provinsi Papua tahun 2017-2021. *Competence: Journal of Management Studies*, 17(1), 9-28. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19434>

Irfandhia, N.M., Masnila, N., Indriasari, D. . (2022). Analisis solvabilitas anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2022. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 197–208.

<https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.205>

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mofu, J., & Arza, F. (2025). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan: studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Papua Tahun 2021-2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3(1), 93-110. <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i1.76>

Oktaviani, D. & Febriyanto, V. (2025). Analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan kimia farma pada PT. Kimia Farma Tbk. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 661-673. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1850>

Oktavira, N., & Sriningsih, S. . (2024). Analisis Pemetaan Solvabilitas APBD Pemerintah di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat 2021-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2029–2039.

- <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6087>
- Putri, A.R.D., Sefitriya, R., Bharata, R.W. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Tegal periode 2020 - 2022). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 219-228. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1520>
- Sari, P.I.P., Suhairi, Syofriyeni, N. (2021). Analisis pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari akun persediaan di Sumatera. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 23-36. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.190>
- Sevigo, A.E. & Lathifah, N. (2024). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2022. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(3), 715-724. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>
- Tampubolon, D., Nugroho, T.P., Firmansyah, S., Ervina, N., Latuheru, A., Azahro, M., Purwantoro, Hutajulu, H., Mayndarto, E.C., Andayani, S.U. (2025). *Peran Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan*. Batam. Cendikia Mulia Mandiri.
- Wanodya, R.A., Wibisono, D., Annisa, I.D., Almanikma, M., Ningtyas, S.F., Hapsari, M.T. (2025). Kinerja pendapatan dan belanja daerah kabupaten pasuruan tahun 2018-2023. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 392-406. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.3108>
- Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/rapi.270>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>